

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan adalah fenomena fundamental atau asasi dalam kehidupan manusia. Pendidikan sebagai gejala yang universal, merupakan suatu keharusan bagi manusia, karena disamping pendidikan sebagai gejala sekaligus juga sebagai upaya memanusikan manusia itu sendiri. Dengan perkembangan kebudayaan manusia, timbulah tuntutan akan adanya pendidikan yang terselenggara dengan lebih baik, lebih teratur dan didasarkan atas pemikiran yang matang. Manusia ingin lebih memper tanggung jawabkan caranya dia mendidik generasi penerusnya agar lebih berhasil dalam melaksanakan hidupnya, dalam pertemuan dan pergaulannya dengan sesame dan dunia serta dalam hubungannya dengan tuhan. Pendidikan merupakan pemotong mata rantai pendidikan kemiskinan. Melalui pendidikan yang mencukupi seseorang dapat layak seperti yang diharapkan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai-nilai yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupannya dan sekaligus untuk perbaikan nasib dan peradaban umat manusia. Tentunya harapan manusia pada masa yang akan datang adalah hal yang baik, yaitu keadaan dimana kehidupan seseorang lebih baik dari keadaan sekarang.

Mohammad Saroni dalam bukunya (2017:29) menyatakan bahwa pencerahan diperlukan sebagai suatu usaha sadar untuk menjadikan kita sebagai sosok penting dalam kehidupan dan perubahan yang dimaksud adalah untuk mempersiapkan kita sebagai sosok yang mampu menghadapi setiap perubahan dalam kehidupan.

Menurut Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Berdasarkan UU Sisdiknas tersebut diharapkan pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa dimasa depan. Dengan demikian pendidikan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor penentu suatu bangsa untuk bisa memenangkan kompetensi global.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom

khususnya pasal 3 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah khususnya pasal 3a bahwa “Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu menjadi tanggung jawab daerah. Pemerintah daerah memahami situasi wilayahnya untuk menentukan kebijakan pendidikan terutama pemerataan pendidikan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah tersebut, maka semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan Pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali. Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan Pendidikan. Namun belum semua warga Negara Indonesia mampu mengakses pendidikan sehingga tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan wajib belajar belum sepenuhnya tercapai. Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah masalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan. Masalah pembiayaan pendidikan selalu menjadi masalah krusial bagi masyarakat, terutama pada lapisan masyarakat menengah ke bawah. Mereka adalah masyarakat yang sering menjadi korban dari biaya pendidikan yang terus melangit. Mereka mampu mengikuti proses pendidikan dan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya. Hal ini tentu saja menjadikan mereka sebagai kelompok masyarakat yang dikecewakan oleh kondisi.

Upaya pemerintah untuk memberikan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yaitu salah satunya melalui Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar. Program tersebut diharapkan dapat membangun generasi yang unggul dan masyarakat generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak. Kebijakan Kartu Indonesia Pintar merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk mengatasi masalah yang terjadi karena masih banyak ditemukan siswa yang masih usia sekolah namun putus sekolah karena kesulitan biaya. Kartu Indonesia Pintar sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, karena siswa-siswa tersebut yang berasal dari keluarga miskin sangat rentan akan terjadinya putus sekolah.

Tujuan dari Program Indonesia Pintar adalah untuk membantu siswa miskin memperoleh pendidikan yang layak, mencegah putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka. Bantuan ini diharapkan untuk dimanfaatkan siswa dalam memenuhi kebutuhan sekolah seperti biaya transportasi siswa pergi ke sekolah, biaya perlengkapan sekolah, dan uang saku. Adanya Program Indonesia Pintar diharapkan tidak adalagi siswa yang putus sekolah dengan alasan kurang biaya. Dana bantuan ini merupakan bantuan tunai kepada seluruh anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Agama.

Dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2014 diantaranya mengamatkan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) Kepada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar ini merupakan kelanjutan dari Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang mencakup siswa dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMK/SMA/MA. Dan siswa /warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)/ lembaga kursus dan pelatihan dari rumah tangga/ keluarga dengan status ekonomi terendah secara nasional.

Salah satu lembaga kursus dan pelatihan di Kota Tasikmalaya yang melaksanakan PIP adalah LPK Yuwita Kota Tasimlaya. Peserta pelatihan yang mendapatkan PIP pada Tahap 1 sebanyak 15 orang. Program Indonesia Pintar ini batas usianya dari 6 sampai dengan 21 tahun. Sedangkan di tempat kursus dan pelatihan di LPK Yuwita rata-rata peserta didiknya itu sudah berumur dan kebanyakan sudah menikah dan bekerja. Jumlah peserta pelatihan apakah yang diusulkan sudah sesuai dengan kriteria dan ketentuan untuk memperoleh PIP atau tidak.

Penelitian ini penting dilaksanakan karena Program Indonesia Pintar merupakan program beasiswa yang mendukung pendidikan menengah universal atau pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang

bermutu dan mampu meningkatkan partisipasi pendidikan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini para pemangku kepentingan khususnya Dinas Pendidikan Provinsi atau Kota dan sekolah mampu membuat kebijakan yang tepat dalam mengontrol implementasi Program Indonesia Pintar agar tepat sasaran dan mampu mencapai tujuan dengan pertimbangan banyaknya peserta pelatihan yang memperoleh beasiswa dan rekomendasi PIP dari dinas Pendidikan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. KIP belum mampu didistribusikan secara serempak mengingat usia yang berhak memperoleh dana PIP 6 dengan 21 tahun.
2. Pencairan hanya dapat satu kali saja
3. Jumlah peserta didik tidak sesuai dengan tujuan yang sesuai dengan yang diamanatkan.
4. Dinas pendidikan dan lembaga sulit mengontrol atau mengawasi penggunaan dana PIP.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penelitian merumuskan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Indonesia Pintar di LPK Yuwita?
2. Bagaimana dampak dari Program Indonesia Pintar di LPK Yuwita?

### **D. Definisi Operasional**

Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam menginterpretasikan juga memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Adapun istilah yang perlu di tekankan adalah:

#### **1. Implementasi**

Kebijakan lahir melalui proses yang panjang. Menurut Andersen dkk (2008:186) proses kebijakan meliputi agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi dan evaluasi. Untuk Indonesia rencana 20% keberhasilan, implementasi 60% dan 20% adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi, mengendalikan implementasi berkaitan agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dan mengurangi resiko kegagalan implementasi kebijakan.

## 2. Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai dari pemerintah kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang ditandai dengan pemeberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai kelanjutan dari Program Bantuan Siswa Miskin. Kartu Indonesia Pintar kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan tujuan menjamin seluruh anak usia sekolah dapat menempuh pendidikan. Sesuai dengan Intruksi Presiden No. 7 Tahun 2014 yang mengamanatkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai penyempurna dari program sebelumnya yaitu Bantuan Siswa Miskin (BSM). Program Indonesia Pintar bertujuan meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada seberapa besar tingkat keaktifan belajar setelah siswa yang menerima Program Kartu Indonesia Pintar pada jenjang SMP.

## 3. Dampak

Dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi ( baik itu negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satuatau sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kata dampak merupakan kata yang lazim digunakan dalam masyarakat luas hampir familiar di semua tataran usia. Penggnaan kata dampak biasanya dibarengi dengan imbas akhir yang disampaikan



didalam masyarakat secara luas pada umumnya menggunakan dengan pengelompokan seperti di bawah ini:

a. Dampak Positif

Dampak positif ini adalah akibat baik atau pengaruh menguntungkan yang didapat dari berbagai hal atau peristiwa yang terjadi.

b. Dampak Negatif

Dalam hal ini pengaruh atau akibat yang dihasilkan dari kata dampak adalah merugikan dan cenderung memperburuk keadaan.

4. Pelatihan

Istilah pelatihan merupakan terjemahan dari kata “training” dalam bahasa Inggris. Secara harfiah akar kata “training” adalah “train”, yang berarti: (1) memberi pelajaran dan praktik (give teaching and practice), (2) menjadikan berkembang dalam arah yang dikehendaki, (3) persiapan, dan (4) praktik.

Menurut Simamora (1995:287) mengartikan pelatihan sebagai serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seorang individu. Sementara dalam Intruksi Presiden No.15 tahun 1974, pengertian pelatihan dirumuskan sebagai berikut:

“Pelatihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat, dan dengan menggunakan metode yang lebih mengutamakan praktik daripada teori”.

Istilah pelatihan biasa dihubungkan dengan pendidikan. Ini terutama karena secara konseptual pelatihan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Meskipun demikian secara khusus pelatihan dapat dibedakan dari pendidikan. Dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2005, dikemukakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

#### 5. Kursus

Secara umum adalah belajar pengetahuan atau keterampilan dalam waktu yang relatif singkat. Kursus merupakan salah satu pendidikan yang diberikan diluar sekolah resmi (non-formal) untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan diri. Jenis-jenis kursus:

##### a. Kursus resmi

Kursus yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga yang telah memenuhi syarat mendirikan kursus tertentu sebagai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

b. Kursus tidak resmi

Kursus yang diadakan secara pribadi (privat) dari seseorang terhadap orang atau kelompok, dengan kesepakatan tertentu seperti biaya, tempat dan waktu.

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana implementasi Program Indonesia Pintar di LPK Yuwita.
2. Memperoleh dan menganalisis dampak Program Indonesia Pintar di LPK Yuwita.

### **F. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini, yaitu untuk memberikan kontribusi secara teoritis, secara praktis, maupun secara khusus yaitu:

1. Secara Teoritis

Bahwa penelitian ini di harapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan dan berharap dapat menjadi referensi terutama pada ranah pendidikan nonformal dalam pemberdayaan masyarakat.

2. Secara Praktis

Dapat membantu pemerintah memberikan informasi terutama yang menyangkut Program KIP.

3. Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian.

## **G. Sistematika Penelitian**

Untuk mempermudah dalam penyusunan, maka penulis mengemukakan bahasan penelitian yang diurut dari bab pertama sampai terakhir yaitu:

1. Pada bagian awal terdapat halaman sampul, cover, lembar pengesahan, halaman pernyataan keaslian karya ilmiah, abstrak, kata pengantar, daftar isi.
2. Pada bagian inti terdapat bab-bab:
  - a. BAB I adalah sebagai pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, kegunaan/ manfaat penelitian, sistematika penulisan.
  - b. BAB II kajian teori, pada bab ini di bahas masalah kajian teori dampak kepemilikan program indonesia pintar terhadap warga belajar.
  - c. BAB III metode penelitian, membahas tentang rancangan penelitian, fokus penelitian, sumber data, waktu dan tempat penelitian, langkah-langkah penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data.

d. BAB IV hasil penelitian pada bab ini membahas tentang hasil penelitian, pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup , pada bab ini membahas tentang simpulan , implikasi, rekomendasi. Pada bagian akhir terdapat lampiran-lampiran.